

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagai wujud pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja/ Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 (Lembaran daerah Kabupaten purbalinggan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 71);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan untuk membuat dokumen sebagai potret pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana visi dan misi dan Renstra yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 mempunyai tujuan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas yang ingin dicapai oleh DINPERMASDES, sesuai dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat,

serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

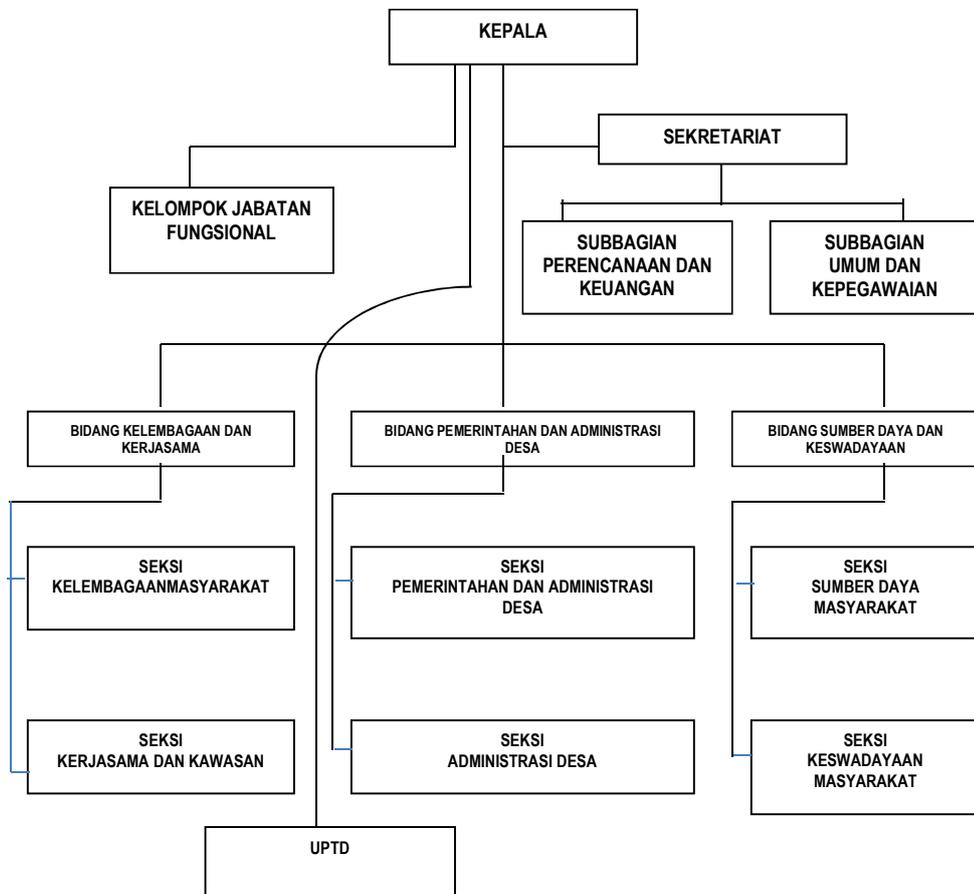
1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- a) KEPALA DINAS;
- b) SEKRETARIAT, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Kawasan.
- d) BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI DESA, terdiri dari:
 - 1) Seksi Administrasi Desa;
 - 2) Seksi Pemerintahan Desa;
- e) BIDANG SUMBERDAYA DAN KESWADAYAAN, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sumberdaya Masyarakat;
 - 2) Seksi Keswadayaan Masyarakat.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel. 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA



4. Sarana Prasarana dan Kepegawaian

Sarana prasarana dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Sarana Prasarana :

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi :

- ruang kerja dan peralatan pendukung kerja,
- ruangan pendukung operasional organisasi
- sarana telekomunikasi dan transportasi.

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di DINPERMASDES cukup memadai namun masih dalam taraf cukup secara fungsi operasional minimal, namun sesungguhnya sangat perlu ditingkatkan kualitas (*upgrade* dan *update*) dan ditambah jumlahnya untuk mengoptimalkan kinerja, karena dengan tuntutan volume kerja saat ini kuantitas sarana prasarana pendukung kerja yang ada masih sangat kurang untuk memacu kecepatan, ketepatan dan akurasi kinerja.

Tabel 1. 2

Prasarana dan Sarana DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga
Per 30 Desember 2017

| NO | SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|----|--------------------|--------|--------|
| 1 | Mobil | 7 | Unit |
| 2 | Sepeda Motor | 8 | Unit |
| 3 | Mesin Tik Manual | 3 | Unit |
| 4 | Mesin Absent | 1 | Unit |
| 5 | Filing Besi/ Metal | 1 | Unit |
| 6 | Filing Kayu | 1 | Unit |
| 8 | AC | 8 | Unit |
| 10 | Lemari Kayu | 1 | Unit |
| 11 | LCD Proyektor | 3 | Unit |
| 12 | Meja Rapat | 5 | Unit |
| 13 | Kursi Tamu | 3 | Set |
| 14 | Meja Kompuer | 3 | Unit |
| 15 | Lemari Es | 1 | Unit |

| NO | SARPRAS | JUMLAH | SATUAN |
|----|---------------------------------------|--------|--------|
| 16 | Televisi | 2 | Unit |
| 17 | Unit Power Supply | 3 | Unit |
| 18 | Camera Video | 1 | Unit |
| 19 | Lain-lain:Meja Rapat Pejabat | 2 | Unit |
| 20 | P.C | 14 | Unit |
| 21 | Laptop | 6 | Unit |
| 22 | Printer | 15 | Unit |
| 23 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2 | Unit |
| 24 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | Unit |
| 25 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 9 | Unit |
| 26 | Kursi kerja Pegawai Non Struktural | 62 | Unit |
| 27 | Kursi Rapat | 32 | Unit |
| 28 | Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II | 2 | Set |
| 29 | Lemari Arsip untuk Arsip dinamis | 3 | Unit |
| 30 | Microphone | 1 | Unit |
| 31 | Audio Tape Reel | 1 | Unit |
| 32 | Faxsimilie | 1 | Unit |

Kpegawaian :

1) Jumlah pegawai

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga per 30 Desember Tahun 2017 adalah sebanyak 30 (Tiga puluh) orang dengan komposisi sebagaimana dalam table dibawah ini :

Tabel 1.3 Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017

| NO | JABATAN/ BIDANG | PNS | HONORER | JUMLAH |
|----|--------------------|-----|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | 11 | 1 | 12 |
| 3. | Bidang Kelembagaan | 6 | - | 6 |

| | | | | |
|----|---|----|---|----|
| | dan Kerjasama | | | |
| 4. | Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa | 6 | - | 6 |
| 5. | Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan | 5 | - | 5 |
| | Jumlah | 29 | 1 | 30 |

- 2) Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
 Gambaran tentang kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut pangkat dan golongan adalah sebagaimana dalam table berikut ini :

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

| NO | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH |
|----|--------------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 |
| 2. | Pembina Tingkat I | IV/b | 3 |
| 3. | Pembina | IV/a | 2 |
| 4. | Penata Tingkat I | III/d | 8 |
| 5. | Penata | III/c | 2 |
| 6. | Penata Muda Tk. I | III/b | 6 |

| NO | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH |
|--------------|--------------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Penata Muda | III/a | 2 |
| 2. | Pengatur Muda Tk.I | II/b | 3 |
| 3. | Pengatur Muda | II/a | 2 |
| Jumlah Total | | | 29 |

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | PRESENTASE |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sarjana Strata 2 | 6 | 20% |
| 2. | Sarjana Strata 1/ D4 | 12 | 40% |
| 3. | D3/ Samud | 2 | 6,66% |
| 4. | SMA/SMK atau Sederajat | 9 | 30% |
| 5. | SD atau Sederajat | 1 | 3,33% |
| | Jumlah | 30 | 100% |

E. Permasalahan Utama (strategic issue) yang dihadapi :

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, serta kondisi yang ada maka dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas ada beberapa permasalahan yang antara lain :

- a. Kapasitas SDM pemerintahan desa belum sesuai kebutuhan
- b. Kebutuhan infrastruktur desa yang cukup tinggi
- c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal
- d. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat belum optimal
- e. Kemiskinan dan pengangguran tersebar di seluruh desa
- f. Sumber Daya Alam (SDA) Desa belum tergarap secara optimal
- g. Belum digunakannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi desa yang terkoneksi.
- h. Rendahnya modal sosial akibat semakin lunturnya nilai budaya dan adat istiadat masyarakat
- i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengelolaan SDA secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- j. Rendahnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat (BUMDes, UED-SP, PUEP, Pasar Desa dan Lumbung Desa) dalam menggerakkan perekonomian di desa (produk, pasar, kemitraan)

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj IP
- D. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama (strategic issue) yang dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis (Renstra Perangkat Daerah)
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

BAB IV P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa yang secara akumulatif diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 2021.

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran jangka pendek berdasarkan indikator-indikator kinerja tertentu.

A. Perencanaan Strategis.

1. Visi :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan daya saing, menciptakan kesadaran untuk mengelola organisasi secara optimal, efeasien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu :

“ PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA
SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG
BERAKLAK MULIA”

2. Misi :

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui misi yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan, oleh karena itu telah ditetapkan pula Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

- i. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien dan efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- ii. Mendorong kehidupan masyarakat yang religious, beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasarkan realitas kebinekaaan.
- iii. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
- iv. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- v. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- vi. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai.
- vii. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari ketujuh misi tersebut, misi yang ke 6 yaitu :
“Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik

untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai” sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun.

Penentuan tujuan dimaksud sebagai arah perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan misi. Dalam menetapkan tujuan tersebut perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sesuai misi RPJM Kabupaten Purbalingga yang meliputi :

| MISI | TUJUAN |
|--|--|
| Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik |
| Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana kewilayahan yang memadai. | Meningkatkan kualitas pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa. |

4. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan spesifik, terinci, dan dapat diwujudkan, serta dapat dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yaitu satu bulan, tiga bulan, satu semester, satu tahun, dua tahun dan seterusnya.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinpermasdes telah menetapkan Sasaran sebagai berikut :

| TUJUAN | SASARAN |
|--|---|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel |
| Meningkatkan kualitas pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa. | 1. Meningkatnya Tingkat Perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa. 2. Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat. |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pada Tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN 2017**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2017 |
|------------|--|---|--------------------|
| 1 | Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel | Tingkat efektifitas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran | 100 % |
| 2 | tingkat perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa | Jumlah desa swasembada | 1 desa |
| | | | |
| | | | |
| 3 | Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat | Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat | Rp. 2.177.063.900 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didasarkan pada tingkat capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2021.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | ≥ 100 | Sangat Berhasil |
| 2. | 75 s.d 100 | Berhasil |
| 3. | 55 s.d 75 | Cukup Berhasil |
| 4. | ≤ 55 | Kurang Berhasil |

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

MISI 1

MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN DEMOKRATIS, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA PRIMA KEPADA MASYARAKAT

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel mendapatkan nilai rata-rata 94,77 % dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel.

| Indikator Kinerja Satuan | Target 2017 | Capaian 2017 | % Capaian | % Capaian Tahun 2016 | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|--|
| | | | | | |

| Indikator Kinerja Satuan | Target 2017 | Capaian 2017 | % Capaian | % Capaian Tahun 2016 | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---|
| Tingkat efektifitas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran | 100 | 94,55 | 94,55 | 95 | 94,77 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1 | | | 94,55 | 95 | 94,77 |

Realisasi capaian tingkat efektifitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2017 menargetkan 100 % dan realisasinya mencapai 94,77 % . Adapun faktor penunjang untuk mencapai indikator tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang meliputi 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan dan Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran yang meliputi belanja pegawai (pembayaran honorarium pegawai PTT, honor pengelola keuangan dan honor pengelola kegiatan), pemenuhan kebutuhan jasa perkantoran (langganan listrik, telepon, air, internet, cetak, jilid, fotocopy), belanja barang habis pakai (Alat tulis kantor, peranko/meterai, bendera/umbul-umbul, peralatan/bahan kebersihan dan lain-lain). Pelaksanaan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 218.660.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 172.574.217,- atau 78,92 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 61.709.980,- dan dalam pelaksanaannya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran tercukupi.

2. Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi.

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk mendukung konsultasi dan koordinasi baik lintas OPD dalam Kabupaten Purbalingga maupun konsultasi dan koordinasi dengan pihak lain kewilayah regional Jateng maupun ke pemerintah pusat/ provinsi lain. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp, 185.745.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 178.436.278,- atau sebesar 96,07 %. Anggaran ini dapat mencukupi kebutuhan perjalanan dalam daerah sebanyak 225 OH maupun perjalanan keluar daerah sebanyak 97 OH selama tahun anggaran 2017.

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran kepada semua pegawai maupun kepada stake holder lain yang berkaitan dengan tupoksi Dinpermasdes. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 296.503.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 288.841.525,- atau 97,42 %. Adapun barang yang dipelihara meliputi Gedung, Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, Mebelair, Komputer/printer, Lat kantor dan alat rumah tangga. Dengan pemeliharaan yang memadai diharapkan akan memperpanjang usia teknis sarana dan prasarana kantor yang ada, serta penggunaan sarpras dimaksud dapat lebih efisien dan efektif.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor tahun 2017 diarahkan untuk mencukupi kebutuhan pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kinerja pelayanan yang semakin baik. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 56.595.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 56.300.000,- atau sebesar 99,48 %. Anggaran dimaksud digunakan untuk pengadaan/ belanja modal.

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi maupun diklat yang berkaitan dengan tupoksi OPD dan dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.955.000,- atau sebesar Rp. 99,97 % dengan mengirimkan peserta sebanyak 7 orang.

6. Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang berupa buku laporan tahunan, laporan bulanan dan laporan semesteran yang terdiri Renstra, Renja, Laporan Ralisasi Fisik dan Keuangan, LKPJ, LKJiP, serta LKD sebanyak 30 Buku laporan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.646.000,- atau 95,58 %.

Hambatan dan Kendala :

Dalam pelaksanaan 6 kegiatan yang tertuang dalam Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah terdapat permasalahan klasik yang berupa keterbatasan SDM, sarana prasarana yang belum memadai, koordinasi intern maupun ekstern yang belum optimal, pengelolaan administrasi kepegawaian yang belum optimal dan penyusunan laporan yang masih belum tepat waktu.

Alternatif solusi :

Dalam rangka meminimalisir dampak dari berbagai permasalahan yang ada, maka agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan target kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai, maka strategi yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan sumber dana yang ada dengan kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi baik intern OPD maupun ekstern dengan OPD lain/Kabupaten lain/Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.

2. Melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pengendalian secara berkala berupa rapat koordinasi teknis maupun dalam kesempatan tertentu (apel pagi) untuk mengecek perkembangan tahapan pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada melalui diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Untuk mewujudkan sasaran ini maka program yang dilaksanakan adalah Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran.
2. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,
6. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD.

MISI 6

MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEHAT DAN MEANARIK UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN MASYARAKAT, YANG DIDUKUNG DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR /SARANA AN PRASARANA KEWILAYAHAN YANG MEMADAI.

SASARAN 1 : TINGKAT PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI STATUS KEMAJUAN DESA.

Hasil evaluasi pada sasaran Tingkat perkembangan dan klasifikasi kemajuan Desa mendapatkan nilai rata-rata 100 % dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Tingkat perkembangan dan klasifikasi kemajuan desa.

| Indikator Kinerja Satuan | Target 2017 | Capaian 2017 | % Capaian | % Capaian Tahun 2016 | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---|
| Desa Swasembada | 1 desa | 1 desa | 100 | 100 | 24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1 | | | 100 | 100 | 23 |

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dijelaskan bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan dan klasifikasi kemajuan desa terdapat 3 kalsifikasi kemajuan desa yang meliputi :

1. Desa Swasembada.
2. Desa Swakarya.
3. Desa Swadaya.

Target capaian perkembangan dan klasifikasi desa diarahkan pada semakin meningkatnya jumlah desa swasembada atau naiknya peringkat dari status desa swakarya menjadi swasembada, dari desa swadaya naik peringkat menjadi desa swakarya atau semakin berkurangnya desa swadaya. Namun demikian untuk mencapainya diperlukan kerja keras dari semua pihak. Berdasarkan kondisi tersebut maka pada perjanjian kinerja tahun 2017

Swasembada ditargetkan hanya 1 desa dan terealisasi 1 desa, untuk desa Swakarya diatargetkan 16 desa dan tercapai 16 desa dan untuk desa swadaya adalah sisa dari total 224 desa/kelurahan yaitu sejumlah 207 desa. Namun demikian sesuai dengan keputusan Bupati Purbalingga No. 060/331 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka IKU untuk pengukuran indikator kinerja utama urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa hanya Jumlah Desa Swasembada. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja tahun 2017 ini yang diukur hanya capaian jumlah desa swasembada pada akhir tahun 2017.berdasarkan laporan profil desa tahun 2017.

Faktor penunjang untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi adalah :

1. Peningkatan cakupan desa untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu.
2. Peningkatan cakupan desa untuk menyusun dan menginput data profil desa secara tepat waktu.
3. Peningkatan cakupan desa untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu.

Kendala atau Hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia penyelenggara pemerintahan desa yang belum optimal,
2. Dukungan penggunaan Tehnologi Informasi yang belum memadai,
3. Pengelolaan data profil desa yang belum optimal,
4. Pengelolaan administrasi desa yang belum optimal,
5. Pengelolaan system informasi desa yang belum memadai,
6. Dukungan regulasi aturan terkait kewenangan desa yang belum memadai.
7. Pendampingan teknis dan administrasi dari Pemerintah Kabupaten yang belum optimal.

Alternatif untuk meningkatkan perkembangan dan klasifikasi status desa adalah dengan :

1. Mengupayakan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah maupun mendorong desa untuk menyusun Peraturan Kepala Desa / Peraturan Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
2. Melakukan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa maupun BPD.
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan dukungan system informasi manajemen sesuai kebutuhan.
4. Lebih mengoptimalkan pendampingan manajemen pengelolaan administrasi desa dan melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala.
5. Mendorong dan mendampingi pemerintahan desa dalam menggali data, mengolah dan menginput data isian Sistem Informasi Profil Desa agar laporan laporan profil desa bias lebih baik lagi baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu penyusunan dan pelaporannya.
6. Melakukan pembinaan dan pendampingan agar desa lebih maksimal untuk melakukan pendataan, mengolah dan menginput data dalam Sistem Informasi Profil Desa.
7. Mendorong desa agar dapat menggandeng relawan Informasi Teknologi yang ada di desanya untuk membantu mengolah, menginput dan menyajikan laporan profil desanya.

Realisasi capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 tersebut, dipengaruhi beberapa faktor yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan, baik lembaga pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa. Dalam rangka mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2016 - 2021, maka pembinaan terhadap keberadaan pemerintahan desa beserta

lembaga kemasyarakatan desa menjadi sesuatu hal mutlak untuk dilaksanakan. Seiring dengan berjalanya waktu maka jumlah lembaga kemasyarakatan desa menjadi sangat banyak dan ini merupakan potensi yang dapat mendukung program-program pembangunan sepanjang pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat memberdayakan sesuai potensi masing-masing. Adapun faktor pendukung dimaksud adalah :

7. Dilakukannya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa, BPD, dan KPMD agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kapasitas dan kewenangannya.
8. Dilakukannya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada lembaga ekonomi yang merupakan pilar pengembangan ekonomi desa antara lain pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDes dan BUMDes Bersama) maupun lumbung desa.
9. Dilakukannya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan seperti karang taruna desa/kelurahan, Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW), dan Posyandu yang ada.
10. Dilakukannya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kepada lembaga lembaga pasca program pemberdayaan masyarakat seperti kemasyarakatan seperti BP – SPAM, Lembaga Pengelola IPAL KOMUNAL maupun lembaga lain yang ada dimasyarakat.

Hambatan / Kendala yang dihadapi :

1. Belum optimalnya lembaga Pemerintahan desa dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada didesanya, sehingga potensi lembaga tersebut belum dapat tergali secara maksimal.
2. Belum lengkapnya regulasi desa yang dapat dijadikan sebagai payung hukum terkait keberadaan lembaga kemasyarakatan yang ada.
3. Kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan desa yang belum memadai sehingga peran lembaga juga belum optimal.
4. Masih belum optimalnya pendampingan dari pemerintah kabupaten terhadap keberadaan lembaga kemasyarakatan desa.

5. Terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah maupun pemerintah desa sehingga belum bisa semua lembaga kemasyarakatan desa yang ada.

Alternatif solusi :

1. Meningkatkan kapasitas pengelola lembaga ekonomi maupun lembaga kemasyarakatan yang ada melalui pembinaan secara berkala.
2. Melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan lembaga kemasyarakatan desa yang ada, sehingga tersedia data yang valid sebagai dasar melakukan perencanaan pembinaan.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.
4. Mendorong desa agar dapat menerbitkan regulasi yang dapat mengakomodir keberadaan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Mendorong desa agar dapat memfasilitasi anggaran untuk lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka menunjang operasional lembaga tersebut,
6. Mencarikan terobosan dengan mengakses kerjasama dengan BUMN, BUMD dan lembaga lain dalam bentuk pembinaan dan pendampingan pengelolaan kegiatan.

MISI 6

MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG SEHAT DAN MENARIK UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI GERAKAN MASYARAKAT, YANG DIDUKUNG DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR /SARANA AN PRASARANA KEWILAYAHAN YANG MEMADAI.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT YANG Mendukung PROGRAM PEMBERDAHARAAN MASYARAKAT.

Tabel 3.5.

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program – program pemberdayaan masyarakat.

| Indikator Kinerja Satuan | Target 2017 | Capaian 2017 | % Capaian | % Capaian Tahun 2016 | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---|
| Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program-pemberdayaan masyarakat | Rp. 2.177.063.000,- | Rp. 2.068.209.850,- | 95 | 95 | 95 |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3 | | | 95 | 95 | 95 |

Peranserta atau partisipasi masyarakat dalam program – program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan, tanpa peranserta / partisipasi masyarakat mustahil program pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya peran masyarakat dalam pembangunan dapat berupa moril maupun materiil, namun demikian dalam penetapan sasaran kinerja OPD Dinpermasdes pengukuran jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program program pemberdayaan masyarakat ditetapkan dengan satuan rupiah. Realisasi pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program – program pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 sebesar Rp. 2.177.063.000,- dengan realisasi sebesar 100 %.

Faktor pendukung terhadap keberhasilan capaian sasaran kinerja tersebut adalah :

1. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan TMMD selama tahun 2017.
2. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) atau Gebrak Gotong Royong.
3. Partisipasi aktif dari pengurus PKK pada semua jenjang dan peran aktif seluruh anggota PKK di setiap desa dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan PKK.
4. Partisipasi masyarakat dalam berperan serta dalam kegiatan pembangunan yang didanai dari sumber APBDes masing-masing.
5. Peran warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa.

Kendala / hambatan :

1. Masih lemahnya data yang terkait pelaporan program-program pemberdayaan masyarakat dari desa.
2. Tidak semua kegiatan terdokumentasi dengan baik secara administrasi sehingga menyulitkan perhitungan partisipasi masyarakat yang dapat diukur dengan rupiah.
3. Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam mendukung kegiatan TMMD, Pemberdayaan PKK, Gebrak Gotong Royong (BBGRM).
4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam kegiatan yang didanai dari dana desa.
5. Masih kurangnya komitmen desa dalam menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu.
6. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu.

Solusi / Alternatif :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan desa maupun pihak-pihak yang terkait sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.
2. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan program / kegiatan pemberdayaan yang langsung bersentuhan dengan

gotong royong yang langsung melibatkan masyarakat dengan jumlah besar.

3. Melakukan sosialisasi kegiatan dengan lebih intens kepada desa dan masyarakat di lokasi kegiatan.
4. Melakukan pendampingan kepada desa dalam penyelesaian pelaporan tepat waktu dan tepat mutu.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- A. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitasi DD dan ADD.
 2. Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa.
 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 4. Pelatihan Sistem Keuangan Desa.
 5. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes.
 7. Bupati Tilik Desa.
 8. Penyusunan Laporan Profil Desa.
 9. Penyusunan Perbub Tindak Lanjut UU Desa.
 10. Sistem Informasi Desa (SID).
- B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitasi dan pembinaan Bumdes.
 2. Pemanfaatan dan Pemengalan TTG.
 3. Fasilitasi lembaga ekonomi masyarakat dan sarana prasarana lingkungan.
 4. Fasilitasi Pokjanal Posyandu.
 5. Fasilitasi Pengembangan Kawasan perdesaan.

6. Pembinaan PKK, Karang Taruna, RT/RW, Lembaga Pasca Program, LKMD,
7. Fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan.
8. Fasilitasi laboratorium lapang desa (Labside).
9. Fasilitasi kerjasama antar desa.
10. Pelatihan lembaga kemasyarakatan.
11. Pembinaan kelembagaan pasar desa.
- 12.Revitalisasi kelembagaan lumbung desa.
13. Pembinaan lembaga BP-SPAM
14. Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi.
15. Fasilitasi TMMD,
16. Gebrak gotong royong masyarakat dan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM).

NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

| No. | Sasaran | Nilai Rata-Rata |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel. | 94,77 |
| 2. | Tingkat Perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa | 100 |
| | | |
| 3. | Meningkatnya swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. | 90,00 |
| | Nilai Capaian Kinerja Dinpermasdes tahun 2017 | 94,92 |

**CAPAIAN KINERJA RPJM DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA SAMPAI DENGAN TAHUN
KEDUA RENSTRA TAHUN 2016 - 2021**

| No. | Sasaran | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
|-----|--|------------|------------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel. | 95 | 95 |
| 2. | Tingkat Perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa | 16 | 24 |
| 3. | Meningkatnya swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. | 95 | 95 |
| | Nilai Capaian Kinerja Dinpermasdes tahun 2016 dan tahun 2017 | 69 | 72 |

AKUNTABILITAS KEUANGAN / ASPEK KEUANGAN.

| No. | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | (%) |
|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------|
| 1. | Penyediaan Bahan/Jasa Perkantoran | 218.660.000 | 172.574.217 | 78,92 |
| 2. | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 185.745.000 | 178.436.278 | 96,07 |
| 3. | Pemeliharaan | 296.503.000 | 288.841.525 | 97,42 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|------------|-------|
| | sarpras kantor | | | |
| 4. | Pengadaan sarpras kentor | 56.595.000 | 56.300.000 | 99,48 |
| 5. | Pendidikan dan pelatihan pegawai | 15.000.000 | 14.995.000 | 99,97 |
| 6. | Penyusunan dokumen perenc dan pelaporan SKPD | 8.000.000 | 7.646.000 | 95,58 |
| 7. | Peningkatan kapasitas kelembagaan desa | 50.282.000 | 44.147.000 | 87,80 |
| 8. | Sistem Informasi Desa | 63.739.000 | 53.200.000 | 83,43 |
| 9. | Fasilitasi Alokasi Dana Desa | 100.749.000 | 31.467.500 | 31,23 |
| 10. | Fasilitasi Dana Desa | 100.000.000 | 39.754.500 | 39,75 |
| 11. | Fasilitasi TMMD | 60.000.000 | 6.690.000 | 11,15 |
| 12. | Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 32.023.000 | 2.550.000 | 7,90 |
| 13. | Pemanfaatan dan pengenalan TTG | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 14. | Fasilitasi Laboratorium lapang desa (Labsite) | 20.000.000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|------------|-------|
| 15. | Penyusunan laporan profil desa | 14.925.000 | 14.146.500 | 94,78 |
| 14. | Fasilitasi Pokjantal Posyandu | 23.940.000 | 0 | 0 |
| 16. | Pelatihan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LKMD/LKMK dan lainnya | 20.592.000 | 19.656.000 | 95,45 |
| 17. | Penyusunan Perbub TL UU Desa, | 10.000.000 | 8.026,000 | 80,26 |
| 18. | Penyelenggaraan Musrenbangdes | 55.000.000 | 35,943.755 | 65,35 |
| 19. | Fasilitasi dan pembinaan Bumdes | 40.000.000 | 37.650.000 | 90,00 |
| 20. | Fasilitasi BKK kpd Pemdes | 30.000.000 | 16.090.000 | 53,63 |
| 21. | Bupati Tilik Desa | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 22. | Pelatihan system keuangan desa | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 23. | Diklat manajemen administrasi pemerintahan | 240.206.000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | desa | | | |
| 24. | Revitalisasi kelembagaan lumbung desa | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 25. | Pembinaan kelembagaan pasar desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |
| 26. | Program pemberdayaan masy, berbasis gender (P2MBG) | 40.957.000 | 0 | 0 |
| 27. | Fasilitasi LEM dan Sarpras Lingkungan | 54.000.000 | 6.912.000 | 12,80 |
| 28. | Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi | 30.000.000 | 28.340.000 | 94,47 |
| | JUMLAH | 2.109.226.000 | 1.132.087.795 | 53,67 |

BAB IV
P E N U T U P

Pengukuran hasil yang dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 yang hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Surat MENPAN Republik Indonesia Nomor B/450/M.PAN/2/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk pembiayaannya selain dibiayai melalui APBD Kabupaten, Bantuan Kabupaten, Bantuan Provinsi dan Bantuan Pusat (APBN). Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan mengharuskan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyusun strategi yang tepat dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian kinerja keuangan Dana APBD Murni sebesar 86,90 %, Bantuan Kabupaten 99,82%, Bantuan Provinsi sebesar 100% dan Bantuan APBN sebesar 100% dengan kinerja kegiatan rata-rata 100 % maka prinsip efisiensi telah diterapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga maka dapat dikatakan keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat serta disiplin dari para pelaksana kegiatan sehingga kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan

ekonomi serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan telah direspon dengan berbagai kebijakan dan upaya seoptimal mungkin melalui perubahan sikap mental pejabat dan staf, peningkatan disiplin dan profesionalisme serta menumbuhkan semangat mengembangkan diri.

Melalui upaya demikian diharapkan agar pejabat dan staf dapat lebih mampu dalam mendayagunakan potensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diarahkan pada pencapaian visi dan misi yang diyakini akan dapat meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dan kami mohon saran dan masukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Sekian terimakasih.

Purbalingga, Januari 2018

Plt KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. WIDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610213 199503 1 001

Jumlah Lumbung Desa yang aktif :

Target 34 desa, terealisasi pembinaan dan monitoring kepada 14 Lumbung Desa aktif, sehingga capaian kinerja kegiatan 80%.

▪ Permasalahan :

- Belum semua desa mampu mengaktifkan Lumbung Desa karena berbagai hal, seperti minimnya Modal, lokasi Lumbung yang cukup jauh dari masyarakat, pengelola Lumbung yang belum profesional dan sasaran kegiatan lumbung yang tidak semua desa memiliki.

▪ Solusi :

Pembinaan dan monitoring lebih diintensifkan demi kelangsungan kegiatan Lumbung Desa.

i. Meningkatnya SDM Pengelola Pasar Desa :

Target adalah pembinaan SDM pengelola pasar desa di 34 Pasar Desa, terealisasi monitoring di 34 Desa sehingga capaian kinerja kegiatan 100%.

- Permasalahan :
SDM Pengelola Pasar Desa secara umum belum profesional dalam mengelola daya saing pasarnya dalam menghadapikompetitor di lapangan terutama para penjual keliling yang notabene lebih cepat, lebih tepat dan lebih luwes dalam mendekati pembeli.Selain itu pengelolaan lingkungan dan sarana prasarana pasar desa masih perlu banyak dibenahi dan dicukupi oleh pengelola pasar desa.
- Solusi :
Pengelola Pasar Desa perlu terus diberikan pembinaan dan strategi mengelola daya saing pasar dan meningkatkan daya tawarnya kepada masyarakat dan konsumen.

ii. Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) :

Target desa yang menjadi lokasi kegiatan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) Desa, target desa lokasi kegiatan GEBRAK Gotong Royong sebanyak 21 (dua puluh) Desa. Realisasi kegiatan yaitu 1 (satu) Desa lokasi BBGRM dan 11 (sebelas) Desa lokasi GEBRAK sehingga capaian kinerja kegiatan 100%.

- Permasalahan :
 - Mulai ada kecenderungan terkikisnya semangat gotong royong dikalangan masyarakat, sehingga mendorong Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan kegiatan GEBRAK GOTONG ROYONG agar masyarakat bisa bersama-sama dengan pemerintah kabupaten bekerja keras membangun desanya.

- adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran sisa kegiatan yang terdampak tidak dapat lagi dicairkan dan dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran kegiatan BBGRM ini.
- Solusi :
Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran yang ada, dan mengefektifkan kinerja desa-desa lokasi GEBRAK Gotong Royong dalam persiapan pelaksanaan kegiatan.

iii. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Program Pemberdayaan masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) :

Target untuk 80 (delapan puluh) orang Masyarakat Mitra di 1 (satu) desa lokasi P2MBG.

Realisasi dan capaian kinerja kegiatan P2MBG adalah nihil.

- Permasalahan :
Adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran tidak dapat dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran kegiatan P2MBG ini
- Solusi :
Tidak ada pelaksanaan kegiatan.

- iv. Terfasilitasinya Lembaga Ekonomi masyarakat (LEM): Target untuk pembinaan dan monitoring kepada 10 (sepuluh) Kelompok BP SPAM, terealisasi monitoring kepada 10 (sepuluh) kelompok, capaian kegiatan 30%.
- Permasalahan :
Adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran sisa kegiatan yang terdampak tidak dapat lagi dicairkan dan dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran kegiatan Fasilitasi LEM dan Sarpras Lingkungan ini.
 - Solusi :
Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran yang ada, dan mengefektifkan kinerja Kelompok BP SPAM desa-desa lokasi dalam persiapan pelaksanaan kegiatan.

a. Tercapainya Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan per kapita Riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan : indikator sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan perkapita dengan target Rp.1.016.486.000,- (Satu milyar enam belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan realisasi anggaran Rp. 131.081.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan capaian kinerja 70% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 12,90%.

Adapun Indikator Kinerjanya yaitu ;

(2) Jumlah penerima manfaat program pemberdayaan :

✓ Target untuk 4 (empat) Desa lokasi TMMD (2 Desa TMMD Sengkuyung dan 2 (dua) Desa TMMMD Desa/ Karya Bhakti TNI.

Realisasi adalah 5 (lima) Desa terdiri 3 Desa lokasi TMMD Sengkuyung dan 2 Desa lokasi TMMD Desa/ Karya Bhakti. Tambahan TMMD Desa Sengkuyung III pada tahun 2017 ini karena adanya tambahan TMMD Sengkuyung secara nasional dari 2 kali menjadi 3 kali dalam 1 tahun anggaran. Capain kinerja 100%.

✓ Target untuk 4 Desa Lokasi Pengenalan TTG, realisasi program dan kegiatan nihil, capaian kinerja 0%

▪ Permasalahan :

Adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran sisa kegiatan yang terdampak tidak dapat lagi dicairkan dan dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran

kegiatan Fasilitasi TMMD dan Fasilitasi Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ TTG ini.

- Solusi :
Kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran yang ada, dan mengefektifkan kinerja desa-desa lokasi dalam persiapan pelaksanaan kegiatan.

(3) Jumlah Fasilitasi ADD/ DD : target 224 Desa di 18 Kecamatan, terrealisasi sebanyak 224 Desa di 18 Kecamatan. Capaian kinerja ADD 100% dan DD 100%

- Permasalahan :
 - Adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran sisa kegiatan yang terdampak tidak dapat lagi dicairkan dan dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran kegiatan Fasilitasi ADD dan Fasilitasi DD ini.
 - Masih adanya pengelola keuangan desa yang belum memahami manajemen pengelolaan ADD/ DD, sehingga masih ada pengajuan pencairan yang terlambat atau tersendat mendekati akhir tahun anggaran.
 - Masih banyak desa-desa yang melaksanakan kegiatan fisik di akhir tahun (pada pengajuan ADD dan DD termin II dan III), sehingga target waktu penyelesaian obyek kegiatan tidak terpenuhi atau menjadi sangat pendek dalam melaksanakan penyelesaian fisik obyek.
- Solusi :

- Fasilitasi ADD dan DD dilaksanakan dengan lebih mengefektifkan kinerja aparatur di kecamatan (Camat, Sekcam dan Kasi PMD), Pendamping Desa/PD dan Pendamping Lokal Desa/PLD. Sehingga ketiadaan anggaran di DINPERMASDES akibat permasalahan keuangan yang terjadi tetap dapat melaksanakan proses fasilitasi pencairan dan penyaluran ADD dan DD yang menjadi hak desa. Monitoring dan evaluasi kegiatan ADD dan DD tetap dapat dilaksanakan dengan data yang diperoleh dari pelaporan dan koordinasi dengan Kecamatan dan Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa.
- (4) Jumlah dan prosentase desa berstatus swasembada/ sebutan lainnya : target untuk 3 (tiga) Desa per tahun, terealisasi 3 (tiga) Desa per tahun. Capaian kinerja 80%.
- Permasalahan :
 - Adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran kegiatan yang terdampak tidak dapat lagi dicairkan dan dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.
 - Pemberian penghargaan dan hadiah lomba tidak dapat direalisasikan dan tidak dapat diterimakan kepada pemenang karena termasuk dalam anggaran kegiatan yang terdampak masalah tersebut diatas.
 - Solusi :

- Tetap melaksanakan penilaian Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten dana mendapatkan 3 (tiga) Desa terbaik dengan biaya yang sangat minimal yang telah dapat dicairkan sebelum terkena dampak masalah.
 - Pembiayaan penilaian menggunakan anggaran Sekretariat.
- (5) Meningkatnya pengetahuan aparatur pemberdayaan : target kegiatan adalah 30 orang di 3 desa, realisasi nihil, capaian kinerja 0%.
- Permasalahan :
Adanya permasalahan pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari-Oktober) yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga anggaran kegiatan yang terdampak tidak dapat dicairkan dan dipergunakan untuk realisasi kegiatan, karena ketentuan prosedur keuangan yang berlaku, termasuk anggaran kegiatan Fasilitas Laboratorium Lapang Desa/ Lab Site ini.
 - Solusi :
Kegiatan tidak dilaksanakan
- (6) Dilaksanakannya penyusunan Profil Desa : target kegiatan untuk 239 Desa/ Kel., terealisasi 239 Desa. Capaian kinerja 100%.
- Permasalahan : -
 - Solusi : -

- (7) Terbinanya kegiatan LKMD/ LKMK yang aktif, RT yang aktif, Karang taruna yang aktif, PKK desa yang aktif dan KPMD : target di 104 orang., terealisasi di 104 Orang. Capaian kinerja 100%
- Permasalahan : -
 - Solusi : -
- (8) Tersusunnya Perda/Perbup implemetasi UU Desa : target sosialisasi untuk 1 paket, terealisasi 1 paket. Capaian kinerja 100%
- Permasalahan : -.
 - Solusi : -
- (9) Dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Desa : target 18 Kec dan 224 Desa, terealisasi 18 Kec dan 224 Desa. Capaian kinerja 100%.
- Permasalahan :
 - Adanya permasalahan pengelolaan keuangan kegiatan oleh Bendahara pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari – Oktober)yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga pencairan dana - dana kegiatan yang tidak terdampak bisa terlaksana menjelang akhir tahun, termasuk anggaran kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Desa ini.
 - Solusi :

Kegiatan dilaksanakan hanya sebatas anggaran dan waktu pelaksanaan yang tersisa.

(10) Dilaksanakannya kegiatan BUMDes : target kegiatan adalah melaksanakan monitoring di 50 unit BUMDes di 18 Kecamatan, terealisasi monitoring di 36 unit di 11 Kecamatan.

Capaian kinerja 90%.

- Permasalahan :
 - Adanya permasalahan pengelolaan keuangan kegiatan oleh Bendahara pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari – Oktober)yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga pencairan dana - dana kegiatan yang tidak terdampak bisa terlaksana menjelang akhir tahun, termasuk anggaran kegiatan Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Desa ini.
 - Banyak BUMDes yang telah dibentuk dengan SK Kepala Desa, telah dimasukkan dalam RPJMDes, dialokasikan anggaran dalam APBDDes, namun secara faktual belum mempunyai aktifitas kegiatan yang rutin dan belum aktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa.
- Solusi :
 - Kegiatan dilaksanakan hanya sebatas anggaran dan waktu pelaksanaan yang tersisa.
 - BUMDes perlu diarahkan pada kegiatan riil untuk pemberdayaan ekonomi desa, dengan memberikan pembinaan pada kegiatan ekonomi yang bisa dijadikan kegiatan utama BUMDes. Antara lain melakukan studi komparasi ke luar daerah dengan mengajak para pengelola BUMDes dalam rangka mempelajari kegiatan yang bisa dijadikan aktifitas utama BUMDesnya.

Tabel 6
 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
 (Alokasi Dana Kabupaten)

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--|-----------------|---------------|-------|
| 1 | Tercapainya peningkatan pemerataan pendapatan perkapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan perkapita : 1. Jumlah penerima manfaat program pemberdayaan 2. Jumlah fasilitasi ADD 3. Jumlah dan persentase desa berstatus swasembada/ sebutan lainnya 4. Meningkatnya pengetahuan aparat pemberdayaan 5. Dilaksanakannya penyusunan profil desa : 239 Desa/ Kel 6. Terbinanya kegiatan Posyandu Aktif : 1.191 Posyandu 7. Terbinanya kelembagaan masy yang aktif (LKMD/K, RT, Karang Taruna, PKK Desa/ Kel., KPMD) 8. Meningkatnya pengetahuan SDM Lembaga Kemasyarakatan 9. Tersusunnya Perda/ Perbup implementasi UU Desa 10. Dilaksanakannya Musrenbang Kec dan Des : 18 Kec dan 224 Desa 11. Dilaksanakannya | 1.016.486.000,- | 131.081.000,- | 12,90 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------|---------------|-------|
| | | kegiatan BUMDes : 117 Desa 12. Terfasilitasinya Bantuan Keuangan Khusus : 41 Desa 13. Meningkatnya aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa 14. Dipahaminya administrasi Pemerintahan Desa 15. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa 16. Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa 17. Terlaksananya pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) | | | |
| Nilai Total | | | 1.016.486.000,- | 131.081.000,- | 12,90 |

1. Alokasi Dana Bantuan Kabupaten :

- a. Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka penganggurann dan kemiskinan:

Adapun indikator kinerjanya yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan per kapita, melalui Fasilitasi ADD dengan target Rp. 100.749.000,- (Seratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran Rp. 31.467.500,- (Tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan capaian kinerja 100%, penyerapan keuangan 31,23%, serta melalui Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa berupa bantuan pembangunan/ perbaikan sarana dan prasarana lingkungan dengan target Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), penyerapan keuangan sebesar Rp. 4.260.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

dengan capaian kinerja 96% sedangkan penyerapan keuangan mencapai 14,20%.

- Permasalahan yang dihadapi :
 - Adanya permasalahan pengelolaan keuangan kegiatan oleh Bendahara pengeluaran DINPERMASDES Tahun 2017 (periode Januari – Oktober)yang terdeteksi di pertengahan tahun sehingga pencairan dana - dana kegiatan yang tidak terdampak bisa terlaksana menjelang akhir tahun, termasuk anggaran kegiatan Fasilitasi ADD ini.
 - Bantuan keuangan khusus kepada desa bersumber APBD Kabupaten tidak terserap 100% karena ada desa-desa yang terlambat dalam mengajukan pencairan Termin II melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh BAKEUDA, sehingga anggaran tidak dapat dicairkan. Keterlambatan tersebut lebih didasarkan karena keterlambatan pengelola kegiatan di desa dalam menyelesaikan administrasi keuangan pencairan Termin I.
- Solusi :
 - Fasilitasi ADD dilaksanakan dengan lebih mengefektifkan kinerja aparatur di kecamatan (Camat, Sekcam dan Kasi PMD), Pendamping Desa/PD dan Pendamping Lokal Desa/PLD. Sehingga ketiadaan anggaran di DINPERMASDES akibat permasalahan keuangan yang terjadi tetap dapat melaksanakan proses fasilitasi pencairan dan penyaluran danaADD yang menjadi hak desa. Monitoring dan evaluasi kegiatan ADD tetap dapat dilaksanakan dengan data yang diperoleh dari pelaporan dan koordinasi dengan Kecamatan dan Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa.

Tabel 7
 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
 (Alokasi Dana Bantuan Kabupaten)

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % |
|--------------------|---|---|--------------------|------------|--|
| 1 | Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan per kapita : 1. Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah desa 3. Bantuan Desa Lokasi TMMD 4. TMMD Sengkuyung I 5. TMMD Sengkuyung II 6. TMMD Sengkuyung III 7. TMMD Desa Pedan-Tegalpingen 8. TMMD Pembangunan Saluran Air Bersih | 190.749.000 | 42.417.500 | 100 14,20 100 100 100 100 100 100 |
| Nilai Total | | | 109.749.000 | 42.417.500 | |

2. Alokasi Dana Bantuan Provinsi :

- a. Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan :

Adapun indikator kinerjanya yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan per kapita, melalui :
 - (a) Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (Sengkuyung I, II dan II) dengan target Rp.374.400.000,- (Tiga ratus tujuh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp.374.400.000,- (Tiga ratus tujuh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.

- (b) Kegiatan Ketahanan Masyarakat Desa dengan target Rp. 6.720.000.000,-(Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 6.720.000.000,- (Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan capaian kinerja 100%.
- (c) Bantuan Operasional KPMD, target Rp. 1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.120.000.000,-(Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan capaian kinerja 100%.
- (d) Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan, target Rp. 1.900.000.000,-(Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan capaian kinerja 100%.
- (e) Rintisan Model Desa Berdikari (Desa Kedarpan Kec. Kejobong dan Desa Limbasari Kec. Bobotsari @ Rp. 50.000.000,-), target anggaran Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 8
 Nilai Capaian Kinerja Keuangan
 (Alokasi Dana Bantuan Provinsi)

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % |
|--------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan per kapita : 1. Fasilitasi TMMD 2. Kegiatan Ketahanan Masyarakat 3. Bantuan Operasional KPMD 4. Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan 5. Rintisan Model Desa Berdikari | 374.400.000,- 6.720.000.000,- 1.120.000.000,- 1.900.000.000,- 100.000.000,- | 374.400.000,- 6.720.000.000,- 1.120.000.000,- 1.900.000.000,- 100.000.000,- | 100 100 100 100 |
| Nilai Total | | | 10.214.400.000,- | 10.214.400.000 | |

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil pengukuran dimaksud merupakan hasil penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)

Adapun hasil pengukuran kinerja tiap-tiap kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Kabupaten

a. Belanja Hibah

Hibah Kepada KODIM

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten melalui Hibah sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)dengan capaian kinerja 100 % dann penyerapan keuangan sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya kegiatan TMMD Desa Pepedan berupa pembukaan jalan baru menuju akses Jembatan Sungai Gintung Desa Pepedan Kec. Karang Moncol menuju Desa Tegalpingen Kec. Pengadegan, dengan hasil capaian kinerja kegiatan 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya dana Hibah Pemerintah kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan terbangunnya infrastruktur jalan baru akses jembatan Sungai Gintung Desa Pepedan Kec. Karangmoncol ke Desa Tegalpingen Kec. Pengadegan. Capain kinerja 100%

b. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Bahan Dan Jasa Perkantoran

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten Rp.218.660.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.

172.574.217,- (Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 78,92.%.

- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana kantor berupa belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa perkantoran dengan hasil capaian kinerja kegiatan 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas harian kantor, dengan hasil capaian kinerja 100%.

2) Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 185.745.000,-(Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 128.187.018,- (Seratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan belas rupiah) dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 69,01%.
- Indikator Kinerja Output :
Tersalurkannya biaya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 30 kali, luar daerah sebanyak 50 (lima puluh) kali dan terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan hasil capaian kinerja 100%. Koordinasi dilaksanakan antar OPD teknis di Kabupaten Purbalingga, dengan OPD teknis di tingkat

Provinsi Jawa Tengah dan dengan Kementerian di Jakarta.

- Indikator Kinerja Outcome :
Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas harian kantor dan tugas-tugas koordinatif dengan Provinsi dan Pusat, dengan hasil capaian kinerja 100%

3) Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 296.503.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 271.709.725,- (Dua juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 91,64%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya belanja barangkegiatan service kendaraan dinas, penggantian suku cadang, terpenuhinya BBM/ oli, perpanjangan STNK, belanja pemeliharaan gedung (pengecatan bangunan induk dan bangunan pendukung, renovasi kecil gedung) dan pemeliharaan peralatan kantor berupa telepon, komputer, *printer* dan *AC*, dengan capaian kinerja kegiatan 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas harian kantor, dan mendukung kinerja optimal dinas dengan hasil capaian kinerja 100%

4) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 56.595.000,- (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 56.300.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 99,48%.

- Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya belanja modal berupa:

pengadaan printer seri *Canon*, mesin PABX, pesawat telpon dan mebelair (meja kursi tamu, meja Eselon II, lemari arsip ruang Kepala Dinas), Pendingin Udara (AC), Pembuatan Papan Nama Dinas, Pembersihan dan pengecatan ulang tembok ruang ruang kantor dan ruangan pendukung, dengan capaian kinerja kegiatan 100%.

- Indikator Kinerja Outcome :

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas harian kantor, berfungsinya operasional kantor yang normal paska pemindahan kantor DINPERMASDES dari lokasi lama di Jl. Letkol Isdiman Nomor 5 Kel. Purbalingga Kidul ke bangunan kantor eks DINSOSNAKERTRANS Jl. Letjen S. Parman Nomor 5 Kel. Bancar, dengan hasil capaian kinerja 100%

5) Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar sebesarRp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp.7.780.000,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 51,87%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan (Diklat), Kursus dan Sosialisasi sebanyak 5 (lima)kali
- Indikator Kinerja Outcome :
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai dengan hasil capaian kinerja 100%

6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 7.646.000,- (Tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 95,58%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) OPD Tahun 2017.
- Indikator Kinerja Outcome :

Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, LAKIP dan LPJ. Capaian kinerja kegiatan 100%.

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa

1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 50.282.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 8.780.000,- (Delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 17,46%.

- Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa bagi aparatur di 224 desa, dengan capaian kinerja 100%.

- Indikator Kinerja Outcome :

Terlatihnya Aparatur Pemerintahan Desa di 224 di desa.

2) Sistem Informasi Desa (SID)

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 63.769.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu

rupiah), capaian kinerja 80 %,penyerapan keuangan sebesar 10,35%.

- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya Sosialisasi SID di 224 Desa
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan SID di 224 Desa.

3) Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesarRp. 100.749.000,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) realisasi sebesar Rp. 31.467.500,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 31,23%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya sosialisasi ADD, terlaksananya pelatihan TPK ADD, terfasilitasinya pencairan ADD di 224 desa.
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya pencairan dana ADD di 224 Desa, dengan capaian kinerja 100%

4) Fasilitasi Dana Desa (DD)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesarRp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp. 39.754.500,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 39,75%.
- Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya sosialisasi DD, terlaksananya pelatihan TPK DD, terfasilitasinya pencairan DD di 224 desa.

- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya pencairan dana DD di 224 Desa, dengan capaian kinerja 100%

5) Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 6.690.000,- (Enam juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) capaian kinerja 90 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 11,15%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung dan TMMD Desa/ Karya Bakti TNI, yaitu :
 - ❖ Fasilitasi TMMD Sengkuyung I di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, dengan kegiatan berupa :
 - pembangunan jalan makadam sepanjang 1.500 M lebar 3 M,
 - pembangunan gorong-gorong volume 80 Cm dan gorong-gorong volume 100 Cm.
 - ❖ Fasilitasi TMMD Sengkuyung II di Desa Pagerandong Kec. Kaligondang, dengan kegiatan berupa :
 - pembangunan jalan makadam dengan volume 200 meter kali 3 meter,
 - pengaspalan jalan volume 660 M kali 3 M

- serta pembangunan talud volume 0,40 M x 0,30 M x 1 Mx 100 M dan
- Rehab gorong-gorong 80 cm sebanyak 1 buah.
- ❖ Fasilitasi TMMD Sengkuyung III di Desa Karangjengkol Kec. Kutasari (TMMD Sengkuyung III merupakan program baru Tahun 2017 dari Mabes TNI), dengan kegiatan berupa :
 - Jalan makadam sepanjang 930 meter X 3 meter, membuka jalur alternatif dari Desa Karangjengkol menuju Desa Serang Kecamatan Karangreja,
 - melewati area perhutani sepanjang kurang lebih 6 Km dan juga akses menuju kawasan wisata Baturaden Kabupaten Banyumas.
- ❖ Fasilitasi TMMD Pembangunan jalan akses Jembatan Sungai Gintung Desa Pepedan Kec. Karangmoncol ke Desa Tegalpingen Kec. Pengadegan, volume 1.600 M x 9 M
- ❖ Fasilitasi TMMD Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Kutabawa Kec. Karangreja, berupa pembiayaan untuk Sekretariat Komando Pengendali, Biaya BBM Pergeseran pasukan, Perlengkapan Kerja dan uang Lauk Pauk personil.
- Indikator Kinerja Outcome :
Terbangunnya infrastruktur perdesaan di 3 (tiga) desa lokasi TMMD Sengkuyung dan 2 (dua) Desa Lokasi TMMD Desa/ Karya Bakti, dengan capaian kinerja 100%.

6) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 32.023.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua Juta Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) capaian kinerja 80%.

- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya kegiatan penilaian Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lomba Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga di 3 (tiga) desa di 3 (tiga) kecamatan, dengan urutan pemenang sebagai berikut :
 - (1) Juara 1 yaitu Desa Majapura Kec. Bobotsari,
 - (2) Juara 2 Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah dan
 - (3) Juara 3 Desa Kaliori Kec. Karanganyar.Capaian kinerja 90%
- Indikator Kinerja Outcome : -
Terpilihnya 3 (Tiga) Desa sebagai Pemegang Lomba Desa Tingkat kabupaten tahun 2017

7) Pemanfaatan dan Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar **Rp. 25.000.000,-**(Dua puluh lima juta Rupiah), realisasi keuangan Rp. 0,-capaian kinerja 0 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar **0%**.
- Indikator Kinerja Output : -
- Indikator Kinerja Outcome : -

8) Fasilitasi Laboratorium Lapang Desa (Labsite)

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar **Rp.0,-** capaian kinerja **0 %** sedangkan penyerapan keuangan sebesar **0%.**

- Indikator Kinerja Output : -
- Indikator Kinerja Outcome : -

9) Penyusunan Laporan Profil Desa se-Kabupaten Purbalingga

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp.14.925.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 5.775.000,- (Lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 38,69%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya program dan kegiatan entri data Profil Desa dan Kelurahan bagi 224 desa melalui kegiatan pelatihan, capaian kinerja 100 %.
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersusunnya data Profil Desa bagi 224 Desa dengan capaian kinerja kegiatan 100%.

10) Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 23.940.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), realisasi keuangan sebesar

Rp. 0,-capaian kinerja 80 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 0%.

- Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya penilaian Pemilihan Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 2,3,4 Agustus 2017.

Penilaian Tingkat Kabupaten dilaksanakan di 3 (tiga) Posyandu Desa/ Kelurahan dan menghasilkan urutan pelaksana terbaik sebagai berikut :

- Terbaik 1 Posyandu Triguna Desa Lambur Kec. Mrebet,
- Terbaik 2 Posyandu Lestari IV Desa Pakuncen Kec. Bobotsari dan
- Terbaik 3 Posyandu Nusa Indah Desa Darma Kec. Kertanegara,

dengan pencapaian kinerja 80 %,

- Indikator Kinerja Outcome :

Terpilihnya 3 (tiga) Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, dengan capaian kinerja 80%.

11) Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LKMK, RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya)

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp.20.592.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) realisasi sebesar Rp 4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) capaian kinerja 100 % sedangkan penyerapan keuangan sebesar 24,04%.

- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya program dan kegiatan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan LKMD.LKMK/ atau sebutan lain yang diikuti oleh 104 orang dari 104 orang, capaian kinerja 100 %.
- Indikator Kinerja Outcome :
Dilaksanakannya Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan LKMD/LKMK/ atau sebutan lainnya selama 2 hari bagi 120 peserta dari 104 orang, capaian kinerja kegiatan 100%.

12) Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tindak Lanjut Implementasi UU Desa

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp. 0,- capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 0 %.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya program dan kegiatan Penyusunan Perbup Implementasi UU Desa berupa rapat-rapat koordinasi sosialisasi UU Desa, capaian kinerja 100 %
- Indikator Kinerja Outcome :
Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi penyusunan Perbup Implementasi UU Desa, capaian kinerja kegiatan 100%.

13) Penyelenggaraan Musrenbangdes Kecamatan dan Desa Tahun 2017.

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp. 10.854.000,- (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 19,73%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya Musrenbangdes tahun 2017 dan tersusunnya RKPDes di setiap desa tahun 2017 dengan capaian kinerja 100% .
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersusunnya Dokumen RKPDes di seluruh desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, dengan capaian kinerja 100%

14) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) capaian kinerja 90% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 23,50%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya kegiatan Monitoring kegiatan BUMDes di 11 Kecamatan dan Rapat-rapat Koordinasi bagi pengelola BUMDes di Kabupaten Purbalingga.
- Indikator Kinerja Outcome :

Dilaksanakannya Monitoring dan Pembinaan BUMDes di 11 Kecamatan.

15) Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 4.260.000,- (Empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 14,20%.
- Indikator Kinerja Output :
Terfasilitasinya kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari APBD Kabupaten bagi 33 (tiga puluh tiga) Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana di 33 (tiga puluh tiga) titik lokasi.
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya Dana Bantuan Keuangan khusus Kepada Pemerintah Desa bagi 33 (tiga puluh tiga) Desa penerima.

16) Bupati Tilik Desa

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp. 0,- capaian kinerja 0% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 0%.
- Indikator Kinerja Output : -
- Indikator Kinerja Outcome : -

17) Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- capaian kinerja 0% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 0%.
- Indikator Kinerja Output : -
- Indikator Kinerja Outcome : -

18) Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar **Rp. 240.206.000,-**(Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-** capaian kinerja **0 %** dan penyerapan keuangan sebesar**0%**.
- Indikator Kinerja Output : -
- Indikator Kinerja Outcome : -

d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa

1) Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan capaian kinerja 100 % dan penyerapan keuangan 11,33%

- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan 14 Lumbung Desa Desa di 14 Kecamatan.dengan capaian kinerja 100 % dan penyerapan keuangan 11,33%
- Indikator Kinerja Outcome : -
Dilaksanakannya monitoring dan pembinaan Lumbung Desa di 14 lokasi

2) Pembinaan Kelembagaan Pengelola Pasar Desa

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah), realisasi keuangan Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Output : -
Terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu pembinaan pengelola pasar desa yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 34 Kelompok di 13 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Dilaksanakannya Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Pasar desa di 34 kelompok di 13 Kecamatan.

3) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Tingkat Kabupaten Purbalingga

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 160.2280.0000,- (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Ribu Rupiah) realisasi sebesarRp. 41.721.500,- (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) capaian kinerja 80% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 26,03 %.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan pelestariannya.
Kegiatan ini terdiri dari serangkaian kegiatan “Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong“ dan Pencanaan Kegiatan BBGRM yang pada tahun 2017 bertempat di Desa Cipaku KecamatanMrebet pada tanggal 19 Mei 2017.
“GEBRAK Gotong Royong“ pada tahun 2017 dilaksanakan di 11 Desa di 11 Kecamatan. Capaian kinerja 80%.
- Indikator Kinerja Outcome : -
Kegiatan Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) terlaksana di 1 (satu) desa dan Gebrak Gotong Royong terlaksana di 11 (sebelas) Desa.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 40.957.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 0,- capaian kinerja 0% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 0%.

- Indikator Kinerja Output : -
- Indikator Kinerja Outcome : -

5) Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Sarana Prasarana Lingkungan

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan realisasi Rp.6.912.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) capaian kinerja 30% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 12,80%.

- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya kegiatan monitoring dan rapat-rapat kegiatan LEM. Capaian kinerja 30%
- Indikator Kinerja Outcome :
Dilaksanakannya rapat-rapat dan monitoring kegiatan LEM. Capaian kinerja 30%

6) Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan realisasi Rp.28.340.000,-(Dua Puluh Delapan Juta Tiga ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 94,47%.

- Indikator Kinerja Output : -
Terlaksananya kegiatan fasilitasi bantuan keuangan provinsi untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan di 10 (sepuluh) Titik
 2. Bantuan Operasional KPMD di 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa
 3. Bantuan Ketahanan Masyarakat di 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa
 4. Rintisan Desa Berdikari di 2 (dua) Desa
Capaian kinerja 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya Bantuan Keuangan Provinsi di Kabupaten Purbalingga, dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 9
 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
 (Alokasi Dana Kabupaten)

| NO | KEGIATAN | NILAI CAPAIAN KINERJA (%) |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Penyediaan bahan dan Jasa Perkantoran | 100 |
| 2 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 100 |
| 3 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100 |
| 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100 |
| 5 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 100 |
| 6 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan OPD | 100 |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 100 |
| 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) | 0 |
| 9 | Fasilitasi Alokasi Dana desa (ADD) | 100 |
| 10 | Fasilitasi Dana Desa (DD) | 100 |
| 11 | Fasilitasi TMMD | 90 |
| 12 | Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat | 80 |
| 13 | Pemanfaatan dan Pengenalan TTG | 0 |
| 14 | Fasilitasi Laboratorium Lapang Desa (<i>Lab Site</i>) | 0 |
| 15 | Penyusunan Laporan Profil Desa | 100 |
| 16 | Fasilitasi POKJANAL POSYANDU | 80 |
| 17 | Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan(LKMD/LKMK) | 100 |
| 18 | Penyusunan Perda/ Perbup Implementasi UU Desa | 100 |
| 19 | Fasilitasi MUSRENBANG Kecamatan dan Desa | 100 |
| 20 | Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes | 90 |
| 21 | Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Bersumber APBD Kabupaten Purbalingga | 100 |
| 22 | Bupati Tilik Desa | 0 |
| 23 | Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) | 100 |
| 24 | Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa | 0 |
| 25 | Revitalisasi Lumbung Desa | 100 |
| 26 | Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa | 100 |
| 27 | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 80 |
| 28 | Program Pemberdayaan masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) | 0 |
| 29 | Fasilitasi dan Pembinaan LEM dan Sarpras Lingkungan | 30 |
| 30 | Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi | 100 |
| | <i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i> | 75 |

Dari hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan dari alokasi dana kabupaten diperoleh nilai rata-rata capaian 75%.

Nilai capaian tertinggi sebesar 100 % diperoleh pada kegiatan :

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran,
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi,
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,
- Pengadaan sarana dan prasarana kantor,
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD,
- Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa
- Fasilitasi ADD
- Fasilitasi DD
- Penyusunan Laporan Profil Desa dan Kelurahan,
- Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LKMK, RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya)
- Penyusunan Perda/ perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa
- Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Bersumber APBD Kabupaten Purbalingga
- Revitalisasi Lumbung Desa
- Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa
- Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi

Sedangkan capaian terendah sebesar 0% diperoleh pada kegiatan :

- Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
- Pemanfaatan dan Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Fasilitasi Laboratorium lapang Desa (Lab Site)

- Bupati Tilik Desa
- Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
- Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG)

Penyerapan sebesar 0% tersebut terjadi karena kegiatan tidak dilaksanakan sama sekali karena adanya permasalahan penggelapan uang kegiatan program oleh Bendahara Pengeluaran. Selain itu ada juga penyerapan dibawah 100% diperoleh pada kegiatan :

- Fasilitasi TMMD (90%)
- Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (80%)
- Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu/ POKJANAL POSYANDU (80%),
- Fasilitasi BUMDes (90%)
- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat/ BBGRM (80%) dan
- Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dan Sarana dan Prasarana Lingkungan (30)

Hal tersebut terjadi karena anggaran untuk kegiatan tersebut bermasalah dalam pengelolaan keuangannya oleh Bendahara Pengeluaran DINPERMASDESTahun 2017 (periode Januari-Oktober) sehingga anggaran yang masih tersisa tidak dapat digunakan karena terkendala ketentuan administrative yang berlaku. Sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyerap anggaran sesuai DPA.

2. Alokasi Dana Bantuan Kabupaten :

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD)

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 93.058.519.000,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) realisasi sebesar 93.058.519.000,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar100%.
- Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya penyaluran dana ADD di 224 desa, dengan capaian kinerja 100%
- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya pencairan dana ADD di 224 Desa, dengan capaian kinerja 100%

2) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 4.546.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) realisasi sebesar Rp. 4.501.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah) capaian kinerja 100% dan penyerapan keuangan sebesar99,34%.
- Indikator Kinerja Output :
Terfasilitasinya kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari APBD Kabupaten bagi 41 Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana di 44 titik lokasi.
- Indikator Kinerja Outcome : -

Tersalurkannya Dana Bantuan Keuangan khusus Kepada Pemerintah Desa bagi 41 Desa penerima di 44 titik lokasi.

3) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya dana APBD Kabupaten sebesar Rp.1.725.600.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) realisasi sebesar Rp.1.725.600.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah)capaian kinerja 100 % dan penyerapan keuangan sebesar 100%.

- Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya kegiatan Bantuan Keuangan untuk kegiatan TMMD, yaitu :

- 1) Bantuan Lokasi TMMD : berupa bantuan operasional desa lokasi TMMD yaitu
 - Desa Grantung, Kec. Karangmoncol,
 - Desa Pagerandong, Kec. Kaligondang,
 - Desa Karangjengkol, Kec. Kutasari,
 - Desa Pepedan Kec. Karangmoncol,
 - Desa Kutabawa, Kec. Karangreja
- 2) TMMD Sengkuyung I Desa Grantung, Kec. Karangmoncol
- 3) TMMD Sengkuyung II Desa Pagerandong, Kec. Kaligondang
- 4) TMMD Sengkuyung III Desa Karangjengkol, Kec. Kutasari.
- 5) TMMD Desa Pepedan, Kec. Karangmoncol
- 6) TMMD Desa Kutabawa, Kec. Karangreja

- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya Bantuan Dana Kabupaten untuk kegiatan Pendamping TMMD dan Bantuan Desa Lokasi di 5 (lima)desa lokasi TMMD, dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 10
 Nilai Capaian Kinerja Keuangan
 (Alokasi Dana Bantuan Kabupaten)

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % |
|--------------------|---|---|------------------------|------------------|-------|
| 1 | Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan per kapita : | | | |
| | | 1. Alokasi Dana Desa (ADD) | 93.058.519.000,- | 93.058.519.000,- | 100 |
| | | 2. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah desa | 6.746.000.000,- | 6.701.000.000,- | 99,34 |
| | | 3. Bantuan Desa Lokasi TMMD | 100.000.000. | 100.000.000.- | 100 |
| | | 4. TMMD Sengkuyung I | 412.800.000,- | 412.800.000,- | 100 |
| | | 5. TMMD Sengkuyung II | 362.800.000.- | 362.800.000,- | 100 |
| | | 6. TMMD Sengkuyung III | 400.000.000,- | 400.000.000,- | 100 |
| | | 7. TMMD Desa Pepedan-Tegalpingen | 350.000.000.- | 350.000.000,- | 100 |
| | 8. TMMD Pembangunan Saluran Air Bersih | 200.000.000,- | 200.000.000,- | 100 | |
| Nilai Total | | | 101.630.119.000 | 101.585.119.000 | |

Tabel 11
 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
 (Alokasi Dana Bantuan Kabupaten)

| NO | KEGIATAN | NILAI CAPAIAN KINERJA (%) |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Fasilitasi Alokasi Dana desa (ADD) | 100 |
| 2 | Fasilitasi TMMD | 90 |
| 3 | Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus Bersumber APBD Kabupaten Purbalingga | 100 |
| Rata-rata Capaian Kegiatan | | 96.67 |

3. Alokasi Dana Bantuan Provinsi :

1. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya anggaran APBD Provinsi dengan target Rp.374.400.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan realisasi Rp.374.400.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.

- Indikator Kinerja Output :

Terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung, yaitu :

- ❖ Fasilitasi TMMD Sengkuyung I di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, dengan kegiatan berupa :

pembangunan jalan makadam sepanjang 1.500 M lebar 3 M, pembangunan gorong-gorong volume 80 Cm dan gorong-gorong volume 100 Cm.

- ❖ Fasilitasi TMMD Sengkuyung II di Desa Pagerandong Kec. Kaligondang, dengan kegiatan berupa pembangunan jalan makadam dengan volume 200 meter kali 3 meter serta pembangunan jalan pengaspalan volume 660 Mx 3 M. serta pembangunan talud dengan volume 0,40 M x 0,30 M x 1 Mx 100 M dan juga rehab gorong-gorongpanjang 80 Cm sebanyak 1 buah.

- ❖ Fasilitasi TMMD Sengkuyung III di Desa Karangjengkol Kec. Kutasari (TMMD Sengkuyung III merupakan program baru Tahun 2017 dari Mabes TNI), dengan kegiatan berupa Jalan makadam sepanjang 930 M X 3 M, membuka jalur alternatif dari Desa Karangjengkol

menuju Desa Serang Kecamatan Karangreja, dengan melewati area perhutani sepanjang kurang lebih 6 Km dan juga akses menuju kawasan wisata Baturaden Kabupaten Banyumas.

- Indikator Kinerja Outcome :
Tersalurkannya Bantuan Dana Pendampingan APBD Provinsi untuk kegiatan TMMD Sengkuyung I dan II di 2 (dua) Desa Lokasi TMMD Sengkuyung, dengan capaian kinerja 100%.

2. Ketahanan Masyarakat Desa

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya anggaran APBD Provinsi sebesar target **Rp.6.720.000.000,-** (Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan realisasi **Rp. 6.720.000.000,-**(Enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)dengan capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Output :
Terfasilitasinya penyaluran dana bantuan provinsi kegiatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk 224 Desa, capaian kinerja 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Terlaksananya pencairan dana kegiatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk 224 Desa sesuai PerGub Nomor 48 tahun 2017. Capaian kinerja 100%

3. Bantuan Operasional KPMD

- Indikator Kinerja Input :

Tersedianya anggaran APBD Provinsi sebesar target Rp. 1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan realisasi anggaran Rp. 1.120.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.

- Indikator Kinerja Output :
Terfasilitasinya penyaluraan dana bantuan provinsi kegiatan Bantuan Operasional KPMD untuk 224 Desa, capaian kinerja 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Terlaksananya pencairan dana kegiatan Bantuan Operasional KPMD untuk 224 Desa sesuai PerGub Nomor 48 tahun 2017. Capaian kinerja 100%

4. Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya anggaran APBD Provinsi sebesar target 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Output :
Terfasilitasinya penyaluraan dana bantuan provinsi kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan untuk 10 titik lokasi kegiatan di 10 Desa, capaian kinerja 100% penyerapan keuangan 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :

Terlaksananya pencairan dana kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan untuk 10 Desa. Capaian kinerja 100%

5. Rintisan Desa Berdikari di Jawa Tengah

- Indikator Kinerja Input :
Tersedianya anggaran APBD Provinsi sebesar target Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Output :
Terfasilitasinya penyaluraan dana bantuan provinsi kegiatan Rintisan Model Desa Berdikari di Jawa Tengah untuk 2 Desa (Desa Kedarpan, Kec. Kejobong dan Desa Limbasari Kec. Bobotsari), capaian kinerja 100% penyerapan keuangan 100%.
- Indikator Kinerja Outcome :
Terlaksananya pencairan dana kegiatan Rintisan Model Desa Berdikari di Jawa Tengah untuk 2 Desa. Capaian kinerja 100%

Tabel 12
 Nilai Capaian Kinerja Keuangan
 (Alokasi Dana Bantuan Provinsi)

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % |
|--------------------|---|--|------------------|-----------------|-----|
| 1 | Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan per kapita : | | | |
| | | 1. Fasilitasi TMMD | 374.400.000,- | 374.400.000,- | 100 |
| | | 2. Kegiatan Ketahanan Masyarakat | 6.720.000.000,- | 6.720.000.000,- | 100 |
| | | 3. Bantuan Operasional KPMD | 1.120.000.000,- | 1.120.000.000,- | 100 |
| | | 4. Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan | 1.900.000.000,- | 1.900.000.000,- | 100 |
| | | 5. Rintisan Model Desa Berdikari | 100.000.000,- | 100.000.000,- | 100 |
| Nilai Total | | | 10.214.400.000,- | 10.214.400.000 | 100 |

Dari hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan yang merupakan alokasi Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah diperoleh nilai rata-rata capaian 100%, hal tersebut tersebut dikarenakan proses pencairan dan jadwal waktu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 13
 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
 (Alokasi Dana Bantuan Provinsi)

| NO | KEGIATAN | NILAI CAPAIAN KINERJA (%) |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | Fasilitasi TMMD | 90 |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi | 100 |
| | <i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i> | 95 |

Dari hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja sasaran2 (dua) kegiatan yang merupakan alokasi Dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah diperoleh nilai rata-rata capaian 90 %.

4. Alokasi Dana Pusat :

1) Dana Desa (DD)

- Indikator Kinerja Input :
 Tersedianya anggaran Dana Desa sebesar Rp. 191.224.910.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 191.224.910.000,-(Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), capaian kinerja 100% sedangkan penyerapan keuangan sebesar 100%.
- Indikator Kinerja Output :
 Terlaksananya penyaluran dana DD di 224 desa, dengan capaian kinerja 100%
- Indikator Kinerja Outcome :
 Tersalurkannya pencairan dana DD di 224 Desa, dengan capaian kinerja 100%

Tabel 14
 Nilai Capaian Kinerja Keuangan
 (Alokasi Dana Bantuan Pusat)

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | REALISASI | % |
|--------------------|---|--|------------------------|-------------------|-----|
| 1 | Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan per kapita : 1. Dana Desa | 191.224.910.000,- | 191.224.910.000,- | 100 |
| Nilai Total | | | 191.224.910.000 | 191.224.910.000 | |

Tabel 15
 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
 (Alokasi Dana Bantuan Pusat)

| NO | KEGIATAN | NILAI CAPAIAN KINERJA (%) |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Fasilitasi Dana Desa (DD) | 100 |
| Rata-rata Capaian Kegiatan | | 100 |

Dari hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan yang merupakan alokasi dana bantuan Provinsi Jawa Tengah diperoleh nilai rata-rata capaian 100 % dan kinerja sasaran diperoleh rata-rata capaian 100% tersebut dikarenakan proses pencairan dan jadwal waktu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan/ Aspek Rasio Keuangan (LRA)

Ditinjau dari aspek keuangan, untuk anggaran Tahun 2017

DINPERMASDES kabupaten Purbalingga pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 16
Target dan Realisasi Keuangan per Kegiatan Tahun 2017

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 (Rp) |
|---|---|---|----------------------|---------------------|
| Terwujudnya paratur Pem. Yang profesional, bersih & berwibawa agar dapat menjadi penggerak pemb. Daerah & mempunyai pelayanan yang prima kepada masy. | Meningkatnya indeks kepuasan masy terhadap layanan public | Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah | 780.503.000 | 644.196.960 |
| | | <i>Kegiatan :</i> | | |
| | | Penyediaan Bahan dan jasa perkantoran | 218.660.000 | 172.574.217 |
| | | Rapat-rapat Koordinasi | 185.745.000 | 128.187.018 |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 296.503.000 | 271.709.725 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 56.595.000 | 56.300.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 15.000.000 | 7.780.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD | 8.000.000 | 7.646.000 |
| | | | | |
| Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita riil serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan perkapita | Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa | 1.016.486.000 | 131.081.000 |
| | | <i>Kegiatan :</i> | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 50.282.000 | 8.780.000 |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) | 63.769.000 | 6.600.000 |
| | | Fasilitasi ADD | 100.749.000 | 31.467.500 |
| | | Fasilitasi DD | 100.000.000 | 39.754.500 |
| | | Fasilitasi TMMD | 60.000.000 | 6.690.000 |
| | | Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 32.023.000 | 2.550.000 |
| | | Pemanfaatan dan pengenalan TTG | 25.000.000 | 0- |
| | | Fasilitasi Laboritrium Lapang Desa (Labsite) | 20.000.000 | 0,- |
| | | Penyusunan Laporan Profil Desa | 14.925.000 | 5.775.000 |
| | | Fasilitasi Pokjanal Posyandu | 23.940.000 | 0 |

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 (Rp) |
|---------|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan | 20.592.000 | 4.950.000 |
| | | Penyusunan Perda/ Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa | 10.000.000 | 0 |
| | | Fasilitasi Musrenbang Kec dan Desa Tahun 2017 | 55.000.000 | 10.854.000 |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes | 40.000.000 | 9.400.000 |
| | | Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus | 30.000.000 | 4.260.000 |
| | | Bupati tilik Desa | 30.000.000 | - |
| | | Pelatihan SISKEUDES | 100.000.000 | - |
| | | Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa | 240.206.000 | - |
| | | | | |
| | | Program pemberdayaan kelembagaan Masyarakat Desa | 312.237.000 | 63.803.500 |
| | | <i>Kegiatan :</i> | | |
| | | Revitalisasi Lumbung Desa | 15.000.000 | 1.700.000 |
| | | Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 160.280.000 | 41.721.500 |
| | | Program pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif gender | 40.957.000 | - |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan LEM | 54.000.000 | 6.912.000 |
| | | Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi | 30.000.000 | 1.470.000 |
| | | | | |
| | | JUMLAH | 2.109.226.000 | 839.081.460 |

D. Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 17
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | URAIAN | CAPAIAN |
|---|--|---|--------------|
| Terwujudnya paratur Pem. Yang profesional, bersih & berwibawa agar dapat menjadi penggerak pemb. Daerah & mempunyai pelayanan yang prima kepada masy. | Meningkatnya indeks kepuasan masy terhadap layanan publik | Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah | 92,09 |
| | | <i>Kegiatan :</i> | |
| | | Penyediaan Bahan dan jasa perkantoran | 78,92 |
| | | Rapat-rapat Koordinasi | 96,07 |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 97,42 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 99,48 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | 99,97 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD | 95,58 |
| | | | |
| | | | |
| Terciptanya keserasian pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah | Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga | Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa | 25,63 |
| | | <i>Kegiatan :</i> | |
| | | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 87,80 |
| | | Pengembangan Sistim Informasi Desa (SID) | 0 |
| | | Fasilitasi ADD | 31,23 |
| | | Fasilitasi DD | 39,75 |
| | | Fasilitasi TMMD | 11,15 |
| | | Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7,96 |
| | | Pemanfaatan dan pengenalan TTG | - |
| | | Fasilitasi Laboritrium Lapang Desa Labsite) | - |
| Penyusunan Laporan Profil Desa | 94,78 | | |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Terciptanya keserasian pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan anta wilayah | Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga | Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa | |
| | | Fasilitasi Pokjnal Posyandu | - |
| | | Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan | 95,45 |
| | | Penyusunan Perda/ Perbup Tindak Lanjut Implementasi UU Desa | 80,26 |
| | | Fasilitasi Musrenbang Kec dan Desa Tahun 2017 | 73,39 |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes | 94,13 |
| | | Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus | 53,63 |
| | | Bupati tilik Desa | - |
| | | Pelatihan SISKEUDES | - |
| | | Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa | - |
| | | | |
| Tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita riil serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan | Meningkatnya pendapatan perkapita | Program pemberdayaan kelembagaan Masyarakat Desa | 33,30 |
| | | <i>Kegiatan :</i> | |
| | | Revitalisasi Lumbung Desa | 100,00 |
| | | Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa | 100,00 |
| | | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | 26,03 |
| | | Program pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif gender (P2MBG) | - |
| | | Fasilitasi dan Pembinaan LEM | 12,80 |
| | | Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi | 94,47 |
| | | JUMLAH | 151 |

BAB IV

P E N U T U P

Pengukuran hasil yang dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 yang hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Surat MENPAN Republik Indonesia Nomor B/450/M.PAN/2/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk pembiayaannya selain dibiayai melalui APBD Kabupaten , Bantuan Kabupaten, Bantuan Provinsi dan Bantuan Pusat (APBN). Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan mengharuskan setiap pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyusun strategi yang tepat dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian kinerja keuangan Dana APBD Murni sebesar 84,96%, Bantuan Kabupaten 99,82%, Bantuan Provinsi sebesar 100% dan Bantuan APBN sebesar 100% dengan kinerja kegiatan rata-rata 100 % maka prinsip efisiensi telah diterapkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga makadapat dikatakan keberhasilan tersebut sangat

ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat serta disiplin dari para pelaksana kegiatan sehingga kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan telah direspon dengan berbagai kebijakan dan upaya seoptimal mungkin melalui perubahan sikap mental pejabat dan staf, peningkatan disiplin dan profesionalisme serta menumbuhkan semangat mengembangkan diri.

Melalui upaya demikian diharapkan agar pejabat dan staf dapat lebih mampu dalam mendayagunakan potensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diarahkan pada pencapaian visi dan misi yang diyakini akan dapat meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dan kami mohon saran dan masukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

Sekian terimakasih.

Purbalingga, Januari 2018

Plt. KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. WIDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610213 199503 1 001

